

1. PENDAHULUAN

1.1 Konsep HCVF (High Conservation Value Forest)

Konsep HCVF (*High Conservation Value Forest*) atau Hutan Bernilai Konservasi Tinggi muncul pada tahun 1999 sebagai 'Prinsip ke 9' dari standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dikembangkan oleh Majelis Pengurus Hutan (*Forest Stewardship Council / FSC*). Konsep HCVF¹ yang didisain dengan tujuan untuk membantu para pengelola hutan dalam usaha-usaha peningkatan keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup dalam kegiatan produksi kayu dengan menggunakan pendekatan dua tahap, yaitu: 1) mengidentifikasi areal-areal di dalam atau di dekat suatu Unit Pengelolaan (UP) kayu yang mengandung nilai-nilai sosial, budaya dan/atau ekologis yang luar biasa penting, dan 2) menjalankan suatu sistem pengelolaan dan pemantauan untuk menjamin pemeliharaan dan/atau peningkatan nilai-nilai tersebut. Salah satu prinsip dasar dari konsep HCV adalah bahwa wilayah-wilayah dimana dijumpai atribut yang mempunyai nilai konservasi tinggi tidak selalu harus menjadi daerah di mana pembangunan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, konsep HCV mensyaratkan agar pembangunan dilaksanakan dengan cara yang menjamin pemeliharaan dan/atau peningkatan HCV tersebut. Dalam hal ini, pendekatan HCV berupaya membantu masyarakat mencapai keseimbangan rasional antara keberlanjutan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Meski konsep HCV pada awalnya didisain dan diaplikasikan untuk pengelolaan hutan produksi ('areal HPH' dalam istilah Bahasa Indonesia), dengan cepat konsep ini menjadi populer dan digunakan dalam berbagai konteks yang lain. Di sektor publik, HCV digunakan dalam perencanaan pada tingkat nasional dan propinsi, antara lain di negara-negara seperti Bolivia, Bulgaria dan Indonesia. Di sektor sumber daya terbarui, HCV digunakan sebagai alat perencanaan untuk meminimalisasi dampak-dampak ekologi dan sosial yang negatif dalam pembangunan perkebunan. Sebagai contoh, kriteria kelapa sawit yang terbarui yang digunakan oleh organisasi multipihak *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi pengelolaan yang berkelanjutan dari RSPO, pembangunan perkebunan baru

¹ Konsep HCVF saat ini sering disebut sebagai 'pendekatan HCV' atau 'proses HCV' (HCV = High Conservation Value atau Nilai Konservasi Tinggi) untuk mencerminkan pemakaian istilah ini dalam bidang-bidang diluar bidang kehutanan

harus menghindari konversi kawasan yang diperlukan untuk mengelola HCV yang ada. Konsep HCV bahkan telah memperoleh kekuatan di sektor keuangan, dengan banyaknya pemberi pinjaman dana komersil yang mensyaratkan penilaian HCV sebagai bagian dari kewajiban peminjam dalam evaluasi pinjaman kepada sektor-sektor yang memiliki riwayat dampak-dampak negatif pada lingkungan hidup dan komunitas-komunitas lokal.

Dengan demikian konsep HCV yang berawal sebagai alat untuk meningkatkan keberlanjutan produksi kayu dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya dan keanekaragaman hayati telah berkembang menjadi konsep yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat. Di sektor swasta, penggunaan konsep HCV menunjukkan komitmen perusahaan untuk melakukan praktek terbaik (*best practice*) yang seringkali melebihi daripada apa yang disyaratkan oleh peraturan atau undang-undang, dan sekaligus memberikan jalan bagi perusahaan untuk menunjukan diri sebagai warga dunia usaha swasta yang bertanggung-jawab. Di sektor pemerintahan HCV merupakan alat yang dapat digunakan untuk mencapai perencanaan tata-guna lahan yang menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat biologi, sosial, dan ekologis yang tidak terpisahkan berada pada alam. Di sektor keuangan, penilaian HCV merupakan cara yang memungkinkan pihak penanam modal komersil yang progresif untuk menghindari praktek pemberian pinjaman yang mendukung perusakan lingkungan hidup ataupun ketimpangan sosial ekonomi. Keragaman kegunaan HCV ini melukiskan betapa luwesnya konsep ini yang menjadi ciri kunci popularitasnya.

1.2 Pengembangan HCVF Toolkit Indonesia

Dalam pengembangan awalnya sejak tahun 1999, konsep HCV (NKT dalam Bahasa Indonesia) terasa sangat sulit untuk diaplikasikan karena kurangnya panduan dan instruksi pendukung yang disediakan oleh FSC. Persoalan ini dijawab pada tahun 2001 dengan diterbitkannya dokumen berjudul “Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi: Suatu Panduan (*Toolkit*) Global” yang dibuat oleh ProForest, sebuah lembaga konsultasi kehutanan Inggris. Perangkat ini menyediakan penjelasan yang lebih mendalam mengenai konsep HCV dan memberikan panduan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan penilaian HCV, namun ditulis dalam format umum agar dapat digunakan secara global. Panduan Global ini selanjutnya merekomendasikan agar dibuat penafsiran nasional (*National interpretation*) atau perangkat alat-alat yang khusus untuk setiap negara yang menyelaraskan konsep HCV dengan keadaan masing masing negara.

Sebuah panduan nasional Indonesia dibuat di akhir tahun 2003 sebagai tafsiran nasional yang pertama dalam hal ini. Judul lengkap dokumen ini adalah “Mengidentifikasi, Mengelola dan Memantau Hutan Dengan Nilai Konservasi Tinggi: Sebuah Toolkit untuk Pengelola Hutan dan Pihak-pihak Terkait lainnya”. Toolkit atau panduan ini dibuat oleh sekelompok stakeholder Indonesia dan asing yang memiliki pengalaman dalam berbagai aspek sertifikasi hutan dan memiliki keahlian dalam berbagai disiplin ilmu yang terkait, termasuk diantaranya kehutanan sosial, antropologi, biologi konservasi, ekologi hutan, biologi vertebrata, dan produksi hutan. Toolkit ini pada dasarnya merupakan hasil terjemahan dari Toolkit HCVF Global yang kemudian dikembangkan melalui serangkaian lokakarya yang diorganisasi oleh Rainforest Alliance dan Proforest, diuji lapangan dan diterbitkan sebagai Draft 1 pada bulan Agustus 2003. Draft ini mencakup komponen-komponen identifikasi, pengelolaan dan pemantauan HCVF di Indonesia, serta direncanakan untuk direvisi dan disempurnakan secara berkala berdasarkan pengalaman yang didapatkan oleh para praktisi, sektor swasta, pemerintah dan stakeholder lainnya dalam penerapannya.

Dalam penerapannya selama ini, Toolkit HCVF versi 2003 untuk Indonesia tersebut dirasakan (semakin) sulit untuk diaplikasikan karena alasan-alasan berikut:

- Toolkit HCVF ini pada mulanya disusun untuk mendukung penilaian-penilaian dalam kerangka sertifikasi pengelolaan hutan alam. Namun, sejalan dengan waktu Toolkit HCVF tersebut secara *de facto* menjadi panduan untuk penilaian HCV di sektor-sektor lainnya, termasuk pulp dan kayu, perkebunan kelapa sawit, serta perencanaan tataguna lahan tingkat propinsi dan kabupaten, yang memerlukan pendekatan yang berbeda dari pendekatan aslinya.
- Penggunaan Toolkit tersebut oleh para praktisi dengan berbagai macam latar belakang menunjukkan masih banyaknya kekurangjelasan dan ketidak-konsistenan dalam konsep-konsep dan definisi-definisi kunci serta dalam tata-cara penilaian HCV yang terutama disebabkan oleh:
 - » cakupan dan tingkat skala ruang (*spatial scale*) yang tidak konsisten dan tidak teratur dalam penilaian berbagai HCV
 - » adaptasi Toolkit HCVF Global yang kurang tepat kedalam konteks Indonesia²
 - » ketidaksempurnaan dalam penerjemahan dari Bahasa Inggris (bahasa yang digunakan dalam Toolkit HCVF Global) kedalam Bahasa Indonesia (yang digunakan dalam Toolkit HCVF Indonesia versi 2003).
- Penggunaan konsep HCV di luar kerangka kerja FSC dipandang banyak pengamat sebagai membawa banyak risiko, karena proses HCV dalam bentuknya yang kini tidak memiliki pengamanan-pengamanan sosial, legal dan persyaratan yang ada di dalam sistem FSC.

²Terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup besar dalam hal nomenklatur, klasifikasi dan terminologi yang digunakan di Indonesia dan di dunia Barat, dimana Toolkit HCVF Global berasal

- Penggunaan konsep HCV secara lebih luas di Indonesia pernah menjadi isu yang sangat kontroversial, yang mana hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya sosialisasi konsep tersebut. Panduan (*Toolkit*) yang aslinya tak pernah disahkan oleh kalangan stakeholder yang terlibat di dalam perencanaan dan uji lapangannya, sehingga kredibilitasnya dalam mendefinisikan proses HCV di Indonesia jadi dipertanyakan.

1.3 Revisi Toolkit Indonesia (Panduan Identifikasi NKT)

Karena alasan-alasan tersebut di atas, maka di paruh akhir tahun 2006 banyak pihak pengguna konsep HCV Indonesia sepakat untuk merevisi dan melakukan pembaruan terhadap Toolkit tersebut untuk meningkatkan daya gunanya di Indonesia. Inisiasi untuk merevisi Toolkit tersebut kemudian diorganisir oleh sebuah konsorsium kemitraan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibawah koordinasi Institut Sumberdaya Indonesia (IndRI) dan Daemeter Consulting dengan partisipasi dari The Nature Conservancy (TNC), Tropenbos International Indonesia (TBI-I), Worldwide Fund for Nature (WWF), Conservation International (CI), Fauna Flora International (FFI) dan Rainforest Alliance. Dukungan finansial selama proses revisi Toolkit berlangsung diperoleh dari berbagai pihak, terutama United States Agency for International Development (USAID), Responsible Asia Forestry and Trade (RAFT), TNC, WWF dan anggota lain dari konsorsium kemitraan.

Revisi Toolkit tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang lebih terstruktur, logis dan rinci mengenai konsep dan metodologi HCV, definisi dan istilah yang digunakan, tahap-tahap dalam proses identifikasi HCV, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- mengakomodasikan secara eksplisit konsep HCV / NKT dalam sektor-sektor yang berbeda (disamping pengelolaan hutan produksi) yang memungkinkan aplikasinya secara umum
- melakukan proses revisi dalam Bahasa Indonesia untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakjelasan serta mendorong keterlibatan yang lebih aktif dari para pihak yang relevan
- melakukan revisi secara transparan dan melibatkan para pemangku kepentingan seluas-luasnya untuk mendapatkan dukungan, komitmen, dan pengakuan secara penuh dalam seluruh proses HCV mulai dari penilaian, sampai pengelolaan dan pemantauan

Revisi ini dilakukan secara partisipatif dengan berbagai cara, baik melalui pertemuan-pertemuan multipihak secara rutin (bulanan) dalam dua kelompok kerja serta pertemuan-pertemuan stakeholder umum di tingkat pusat (Jakarta) dan di daerah (Sumatra, Kalimantan dan Papua), maupun melalui diskusi-diskusi berbasis internet.³

1.4 Maksud Panduan NKT Indonesia yang Diperbaharui

Panduan (*Toolkit*) ini dimaksudkan sebagai suatu protokol standar dalam melakukan penilaian NKT yang dapat menjamin mutu, transparansi, dan integritas aplikasinya di Indonesia. Hal ini dilakukan terutama dengan menjelaskan tahap-tahap yang disyaratkan oleh proses penilaian NKT secara lebih jelas dan rinci, mendefinisikan hak dan kewajiban para pihak terkait, serta menyediakan Panduan dalam mengumpulkan data dan informasi yang memenuhi standar minimum rentang waktu dan mutu. Panduan ini ditulis dalam suatu bentuk yang generik agar dapat diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk sektor perusahaan kayu konvensional, perkebunan kelapa sawit ataupun tanaman industri (*pulp*), pertambangan dan tataguna lahan.

Cakupan Panduan ini dibatasi pada penentuan keberadaan dan penyebaran NKT, dan tidak mencakup pengelolaan atau pemantauannya. Panduan ini akan memberikan “Saran Tindak Pengelolaan” yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan rencana pengelolaan NKT secara multi-pihak antara UP dan stakeholder yang lain, tetapi tidak memberikan resep-resep pengelolaan yang rinci, ataupun panduan tentang bagaimana memantau nilai-nilai itu. Hal-hal tersebut akan dikembangkan dalam modul-modul terpisah dengan rekomendasi-rekomendasi spesifik untuk setiap sektor atau bidang tertentu.

1.5 Penggunaan Panduan

Panduan ini disusun dalam delapan bab yang berbeda dengan isi dan tujuan yang berbeda. Setelah Pengantar di Bab I, dalam Panduan ini terdapat tujuh bab yang disusun sedemikian rupa agar mencerminkan alur alami suatu penilaian NKT. Bab II memberikan daftar istilah-istilah dan konsep penting. Bab III memperkenalkan bentuk dan kriteria NKT yang baru. Bab IV menjelaskan proses NKT, termasuk hak dan kewajiban para

³ Diskusi dan penyebarluasan informasi dalam proses revisi ini diberikan melalui email dan dua situs web, yaitu www.toolkitrevisionwg1.pbwiki.com untuk Kelompok Kerja 1 dan www.hcvfrevisiontoolkitwg2.pbwiki.com untuk Kelompok Kerja 2

pengguna NKT serta penjelasan mengenai keseluruhan prosesnya secara bertahap, mulai dari persiapan penilaian sampai pengelolaan dan pemantauan. Bab V memberikan definisi istilah 'stakeholder' dan apa yang dimaksud dengan konsep 'keterlibatan stakeholder'. Bab VI melukiskan persiapan kerja serta bentuk data dan informasi yang diperlukan sebelum melakukan penilaian di lapangan. Bab VII memberikan penjelasan mengenai bentuk dan cara pengumpulan data lapangan serta penilaiannya. Bab VIII memberikan penjelasan yang mendalam dan rinci mengenai cara dan metoda identifikasi dan pemetaan HCV yang diusulkan. Serangkaian Lampiran cetak dan digital pada bagian akhir dari Panduan ini akan memberikan informasi pelengkap.

Panduan ini disusun dalam bentuk 'modul', sehingga masing-masing pengguna/pembacanya dapat menggunakan bagian-bagian tertentu berdasarkan ketertarikan dan kebutuhannya. Namun demikian dianjurkan bahwa setiap orang, perusahaan atau organisasi-organisasi yang akan melakukan penilaian NKT agar membaca keseluruhan Panduan ini guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai cara melakukan penilaian, dan bagaimana bagian-bagian yang terpisah itu saling melengkapi menjadi satu keutuhan. Pembaca/pengguna yang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar mengenai proses penilaian NKT secara umum, namun tidak merencanakan untuk melakukan suatu penilaian, mungkin hanya perlu membaca Bab IV. Pembaca yang hanya tertarik pada definisi, sasaran dan kriteria dari NKT yang baru hendaknya langsung membaca Bab III. Bagi penilai yang telah berpengalaman dengan penilaian NKT atau pengamat dapat melihat Bab VIII untuk informasi lebih lanjut. Diharapkan pengaturan secara modular ini dapat meningkatkan fleksibilitasnya sembari membentuk kesatuan yang utuh, kuat serta logis dan mudah dimengerti pembacanya.

1.6 Keanggotaan Tim Revisi Panduan NKT Indonesia

Konsorsium Revisi Panduan HCVF Indonesia beranggotakan 8 (delapan) organisasi yaitu The Nature Conservation (TNC), WWF Indonesia, Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia), Indonesian Resource Institute (IndRI), Daemeter Consulting, Flora Fauna International (FFI) Indonesia Program, Conservation International (CI) dan Rainforest Alliance serta sejumlah kontributor independen. Proses revisi secara keseluruhan telah dikoordinasikan oleh Gary Paoli dan Aisyah Sileuw. Dalam prosesnya, dibentuk 2 (dua) Kelompok Kerja (Working Group), yaitu Kelompok Kerja I diketuai oleh Philip Wells dan Kelompok Kerja II diketuai oleh Dicky Simorangkir sampai dengan 31 Oktober 2007 dan digantikan oleh Petrus Gunarso sejak 1 November 2007 - dari TBI Indonesia. Sejumlah nama telah memberikan kontribusi pada Panduan dan kumpulan lampiran panduan, baik editing kalimat dan atau data

yaitu : Gary Paoli, Philip Wells, Aisyah Sileuw, Dicky Simorangkir, Yana Suryadinata, Junaedi Samsudin, Indrawan Suryadi, Alfa Ratu Simarangkir, Deni Wahyudi, Petrus Gunarso, Kresno Dwi Santosa, Edi Purwanto, Prihandoko Sanjatiko, Sulistrya Ekawati, UcoK Sinaga, Iain Woxvold, Betsy Yaap dan Titiek Setyawati.

Selanjutnya terdaftar peserta yang aktif didalam workshop dan diskusi revisi Panduan melalui website, sejumlah nama memberikan kontribusi untuk membangun ide-ide melalui diskusi yang intensif dengan anggota inti tim revisi Panduan, diantaranya adalah : Jonotono, Patrick Anderson, Dodik Nur Rohmat, Semiarto Aji Purwanto, Marcus Colchester, Thomas Hidayat, Hendrayanto, Fergus Macdonald, Pete Wood, Fitriani Ardiansyah, Neil Franklin, Paul Hartman, Eli Lorenzo, Thomas Barano, Anwar Purnomo, Cam Webb, Bas van Balen, Mark Leighton, Jeff Hayward, Erik Meijaard, Doug Sheil, Nardiyono, Christopher Stewart, Neville Kemp, Darmawan Liswanto, Scott Stanley, Edward Pollard, Stephan Wulfraat, Arief Budiman, Purwo Susanto, Indra Plantasia, Art Klassen, Marc Hiller, Albertus Albert, Ian Singleton, Ben Jarvis, I.B.W. Putra, Desi Kusumadewi, Asril Darusamin, Kartini Susandi, Frank Momberg, Hasbillah, Bart van Assen, Iwan Djuanda, Susanto Kurniwan, Didik Prasetyo, David Cassells, Tom Maddox, Agus Salim, Perpetua George, Ruth Nussbaum dan Rod Taylor.

1.7 Ucapan terimakasih

Seluruh anggota tim revisi Panduan mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada seluruh pihak dan organisasi yang telah memberikan kontribusi, langsung maupun tidak, terhadap pelaksanaan revisi panduan ini. Dalam proses revisi Panduan ini, ratusan peserta hadir dan telah memberikan ide dan masukan mereka kepada tim revisi dalam berbagai pertemuan, workshop, diskusi grup, poling opini melalui e-mail serta ulasan langsung terhadap draft panduan yang pertama. Kontribusi tersebut diberikan oleh banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan.

Pendanaan revisi Panduan ini diberikan langsung oleh 3 anggota utama tim yang mendukung terlaksananya revisi Panduan ini – TNC, WWF dan Tropenbos. Uji lapangan terhadap draft pertama dari revisi panduan telah dilakukan dengan dukungan dari PT. Erna Djulawati. Melalui semangat untuk menuju kesempurnaan dan pencapaian peningkatan yang berkelanjutan, tim revisi Panduan mengundang dan mengharapkan tanggapan dari para pembaca, penggunaan dan pengamat tentang aplikasi revisi Panduan ini di Indonesia.

